

Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran Dan Belanja Pemerintah Terhadap
Kemiskinan di Sumatera Utara Tahun 1991-2020

Royan Abel Nadeak

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan,
amosnadeak11@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of inflation, unemployment and government spending on poverty in North Sumatra in 1991-2020. This study uses time series data obtained from the Central Statistics Agency of North Sumatra. This study uses the Error Correction Model (ECM) analysis method. To determine the effect of the independent variable on the dependent variable in the short term and Multiple Linear Regression to determine the effect of the independent variable on the dependent in the long term. From the results of the ECM estimation or short-term analysis, it shows that only the inflation variable has a significant and positive effect on the poverty level in North Sumatra. In the long term, the unemployment variable has been shown to have a significant and positive effect on poverty. On the other hand, in the short term it is also proven that changes in unemployment have a significant and positive effect on poverty. In the long term, the variable of government expenditure has been shown to have a significant and negative effect on poverty.

Keywords: Poverty, Inflation, Unemployment, Government Expenditure.

Pendahuluan

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah lebih dari satu dasawarsa diterapkan di Indonesia tepatnya sejak tanggal 1 Januari 2001, setelah terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui undang-undang ini, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab yang lebih luas dalam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Terutama terkait fungsi alokasi, dengan desentralisasi fiskal akan mempermudah proses alokasi sumber daya dari pemerintah daerah kepada masyarakat melalui belanja daerah sehingga dapat membantu program-program prioritas pemerintah terutama pengentasan kemiskinan di daerah.

Menurut Simanjuntak (2002) dalam Parhah (2006) pada dasarnya desentralisasi fiskal di Indonesia mempunyai beberapa sasaran umum, yaitu: 1) untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara; 2) mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah; 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; 4) mengurangi ketimpangan antar daerah; 5) menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah; 6) meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan serta diharapkan akan mempercepat pengambilan keputusan di tingkat daerah karena pemerintah daerah yang paling mengetahui kebutuhan masyarakatnya, sehingga pemerintah daerah mempunyai peluang dan kesempatan lebih besar dalam menanggulangi kemiskinan.

Tabel 1. Perkembangan penduduk miskin, Tingkat Inflasi, pengangguran dan belanja pemerintah di Sumatera Utara

NO	Tahun	Penduduk Miskin	Inflasi	Pengangguran	Belanja Pemerintah
1	1991	1,353,736	8.99	115,316	336.90
2	1992	1,342,638	4.56	196,815	383.20
3	1993	1,331,631	9.75	236,376	458.70
4	1994	1,298,325	6.78	277,673	515.60
5	1995	1,265,851	10.54	320,787	584.00
6	1996	1,234,194	8.88	302,877	660.80
7	1997	1,775,321	13.10	252,220	771.00
8	1998	3,550,642	83.50	353,467	342.50
9	1999	1,972,700	1.37	326,520	449.00
10	2000	1,883,890	12.50	335,729	416.80
11	2001	1,913,040	14.79	229,212	916.20
12	2002	1,883,890	9.59	355,504	1,021.30
13	2003	1,889,400	4.23	404,117	1,352.00
14	2004	1,800,100	6.80	758,092	1,501.50
15	2005	1,760,228	22.41	636,980	1,830.60
16	2006	1,979,702	6.11	632,049	2,184.70
17	2007	1,770,000	6.60	571,334	2,560.70
18	2008	1,630,000	10.72	554,539	2,967.30
19	2009	1,500,000	2.61	532,427	3,444.56
20	2010	1,490,000	8.00	491,806	3,666.70
21	2011	1,436,400	3.67	402,125	4,611.47
22	2012	1,400,400	3.86	379,982	7,633.63
23	2013	1,416,400	10.18	412,202	7,260.47
24	2014	1,360,600	8.17	390,712	7,808.56
25	2015	1,508,140	3.34	428,794	7,959.17
26	2016	1,452,600	6.34	371,680	9,476.42
27	2017	1,326,600	3.20	377,288	12,518.86
28	2018	1,291,900	1.23	396,027	12,563.39
29	2019	1,260,500	2.33	382,438	13,440.32
30	2020	1,356,700	1.96	507,805	12,653.60

Sumber : BPS Sumatera Utara

Dari data diatas dapat dilihat jumlah orang penduduk miskin di Sumatera Utara masih cukup tinggi dan cenderung fluktuatif. Jumlah penduduk miskin terendah ada di tahun 1996 yakni hanya sebesar 1,234,194 jiwa sedangkan jumlah penduduk miskin terbanyak ada di tahun 1998 yakni sebesar 3,550,642 jiwa. Tingkat inflasi yang tinggi juga adalah salah satu pendorong banyaknya orang miskin di Sumatera Utara. Dari data diatas tingkat inflasi tertinggi ada di tahun 1998 sebesar 83.50% sedangkan tingkat inflasi terendah ada di tahun 2018 dengan hanya 1.23 %. Pengangguran juga sangat mempengaruhi kemiskinan karena semakin banyak orang menganggur maka berdampak secara personal maupun keluarga dengan menjadi penduduk miskin. Dalam data yang dipaparkan pada tahun 2004 jumlah pengangguran ada di angka tertinggi dengan 758,092 jiwa tercatat sebagai penganggur sedangkan tahun 1991 menjadi tahun dengan jumlah penganggur paling sedikit dengan jumlah 115,316 jiwa. Pemerintah tentu

mengambil kebijakan yang nyata dengan mengeluarkan belanja pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara umum belanja pemerintah meningkat setiap tahun karena dilatarbelakangi dengan kebutuhan masyarakat yang juga meningkat setiap tahun.

Banyak faktor yang membuat banyaknya jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Faktor yang paling utama adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia untuk bekerja dalam pekerjaan yang baik diperparah juga dengan sikap kebanyakan masyarakat yang cenderung malas untuk bekerja dan hanya menantikan bantuan dari sesama bahkan dari pemerintah. Pemerintah juga sudah memberikan kebijakan dalam hal mengurangi jumlah penduduk miskin akan tetapi jika diamati faktor-faktor seperti inilah yang mendorong masih banyaknya penduduk miskin di Sumatera Utara.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Utara. Tingkat Inflasi yang tinggi di suatu daerah sangatlah tidak baik bagi pengentasan kemiskinan karena jika harga barang terus naik maka masyarakat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan primer mereka sehingga mereka berada dalam kemiskinan. Selain itu angka pengangguran yang tinggi juga dapat membuat jumlah orang miskin bertambah. Oleh karena itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yaitu dengan mengeluarkan belanja pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu sesuai dengan penjelasan diatas maka penulis perlu menganalisis lebih jauh faktor-faktor apakah diantara ketiga faktor diatas yang mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Utara. Oleh karena itu penelitian ini diberikan judul "Pengaruh Inflasi, pengangguran dan belanja pemerintah terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Tahun 1991-2020".

Landasan Teori

Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam hal untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan mendefinisikan dan mengukur kemiskinan karena ia memiliki dimensi ruang dan waktu . Berbagai konsep, pengertian, dan cara mengukurnyapun terus berkembang dan menjadi perdebatan yang hangat. Oleh karena itu, konsepnya harus difahami, apa yang mendasarinya dan bagaimana mengukur serta mengatasinya, karena keberhasilan pengurangan kemiskinan sangat ditentukan oleh pemahaman terhadap konsep kemiskinan itu sendiri. Seseorang dikatakan miskin atau hidup dalam masalah kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian tersebut. Secara absolut, seseorang dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standar hidupnya secara absolut berada dibawah subsisten (Ningsih & Andiny, 2018). Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Suharto (2009) menjelaskan dalam kutipan buku membangun masyarakat memberdayakan masyarakat" bahwa teori-teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

Paradigma *Neo-Liberal*

Pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan. Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai

komponen penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapuskan kemiskinan. Paradigma neo-liberal ini digerakkan oleh Bank Dunia dan telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh hampir semua kajian mengenai kemiskinan. Teori-teori modernisasi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan produksi merupakan dasar teori-teori dari paradig ini. Kelemahan paradigma ini adalah terlalu memandang kemiskinan hanya melalui pendapatan dan kurang melibatkan orang miskin sebagai subyek dalam permasalahan kemiskinan.

Paradigma Demokrasi-Sosial

Paradigma ini tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan structural dan mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan ini sangat mengkritik sistem pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapuskan, karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. Peran negara dalam pendekatan ini cukup penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Kelemahan teori ini adalah adanya ketergantungan yang tinggi pada negara dalam membentuk struktur dan institusi untuk menanggulangi kemiskinan.

Inflasi

Menurut Murni (2013:202), dalam kutipan Serena, Sila dan Sebo (2020) inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Menurut Sukirno (2011:165), inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rejeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut *inflationary gap*). *Inflationary gap* timbul karena adanya golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang. Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana (Boediono, 1998). Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar, tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar. Psikologi (*expectations*) masyarakat mengenai harga-harga.

Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai harga-harga di masa mendatang.

Pengangguran

Menurut Kasim, Engka dan Siwu (2021) pengangguran merupakan seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Menurut Sukirno (2011:14), pengangguran diartikan sebagai

keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Beberapa teori-teori pengangguran yang dikemukakan yaitu:

1. Teori Klasik.

Teori klasik ini menjelaskan pandangan dalam bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Jadi dalam teori klasik tersebut jika terjadinya kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun.

2. Teori Keynes.

Dalam hal menanggapi masalah pengangguran Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik. Menurut teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah, sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi.

Menurut Sukirno (2011:14), pengangguran adalah keadaan tenaga kerja tanpa pekerjaan yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Angka pengangguran yang tinggi di suatu daerah sangatlah tidak baik bagi pengentasan kemiskinan karena jika pengangguran meningkat maka pendapatan masyarakat relatif rendah sehingga jumlah masyarakat miskin bertambah. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2018), menunjukkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin tidak baik bagi pengentasan kemiskinan karena pendapatan masyarakat akan menjadi rendah sehingga menambah jumlah masyarakat miskin.

Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Teori makro mengenai pertumbuhan belanja pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan kedalam model pembangunan tentang perkembangan belanja. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses dan persentase investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat perkembangan ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan sarana prasarana ke belanja untuk aktivitas sosial, seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan dan sebagainya.

Teori pertumbuhan endogen memberikan gambaran mengenai peran pemerintah di dalam proses pertumbuhan. Barro (1991), menguji model pertumbuhan endogen mengenai hubungan antara bagian belanja pemerintah di dalam GDP dan tingkat pertumbuhan GDP riil per kapita. Keistimewaan model Barro ini adalah adanya *constant returns to capital* secara luas termasuk *private capital* dan *publik services*. Secara luas mempertimbangkan input *public services* di dalam produksi, tepatnya hubungan yang timbul antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah yang tidak produktif (C_g/Y) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan. Devarajan & Vinaya (1993), menemukan hubungan yang negatif dan tidak signifikan hubungan antara belanja produktif dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Lin (1994), menemukan bahwa belanja tidak produktif negatif dan tidak signifikan berdampak

terhadap pertumbuhan ekonomi di negara industri tetapi signifikan positif berdampak pada pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

Belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Filmer & Pritchett (1997), Fan & Thorat (2000), Dollar & Kraay (2001), Bigsten & Levin (2001), Fan & Rao (2004), Laabas & Limam (2004), dan Klasen (2005) memperoleh hasil penelitian jenis belanja pemerintah yang diidentifikasi mempunyai pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kemiskinan adalah belanja untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, perumahan, subsidi, dan transfer.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kuantitatif karena dalam penelitian menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angkanan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel penelitian ini diambil dari data yang tersedia pada laman Bank Indonesia. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang dengan rentang waktu tahun 1991–2020. Penulis menggunakan data yang telah dipublikasikan lalu mencari sumber referensi lain seperti jurnal dan situs web, kemudian disatukan dan diolah hingga dapat disusun membentuk jurnal.

Teknik Analisis Data a. Uji akar unit (unit root test)

Uji ini digunakan untuk melihat apakah data yang akan digunakan telah stasioner yaitu untuk menghindari regresi yang palsu (*spurious*). Apabila terjadi *spurious* hasil regresi, fenomena autokorelasi akan timbul sehingga tidak dapat menggeneralisasi hasil regresi tersebut untuk waktu yang berbeda. Untuk mengetahui apakah data *time series* yang digunakan stasioner atau tidak, digunakan uji akar unit (*unit roots test*). Uji akar unit dilakukan dengan menggunakan metode Dicky Fuller (DF) (Agus, 2016).

Uji kointegrasi

Uji kointegrasi digunakan untuk memberi indikasi awal bahwa model yang digunakan memiliki hubungan jangka panjang (*cointegration relation*). Hasil uji kointegrasi didapatkan dengan membentuk residual yang diperoleh dengan cara meregresikan variabel independen terhadap variabel dependen secara OLS. Residual tersebut harus stasioner pada tingkat level untuk dapat dikatakan memiliki kointegrasi.

Error correction model (ECM)

Pemodelan dengan teknik Error correction model (ECM) digunakan apabila *series data* telah lolos dari uji kointegrasi (Agus, 2016). ECM ini dikenal sebagai model linier dinamis untuk mengetahui kemungkinan terjadinya perubahan struktural, yaitu bentuk hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel bebas dan variabel terikat. Teknik Analisa data ini digunakan untuk variabel yang memberikan efek ketidakseimbangan (*disequilibrium*) bagi makro ekonomi sehingga perlu dilihat *time lag* (jeda waktu) efeknya dalam jangka panjang. Jeda waktu ini berarti antara

pengambil kebijakan perlu menyadari apa yang sebenarnya terjadi dengan penentuan kebijakan yang sebenarnya dibutuhkan oleh makro ekonomi masyarakat.

Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga.

Regresi Jangka Panjang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka panjang.

Hasil Dan Pembahasan

Uji Stasioner

Berdasarkan Uji Augmented Dickey-Fuller yang dilakukan dengan Eviews untuk mengetahui stasioneritas variabel Miskin, Pengangguran, Inflasi, dan investasi maka hasilnya pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Uji Stasioner

Group unit root test: Summary
 Series: LOGMISKIN, INFLASI, LOGPENGANGGURAN, LOGBELANJA
 Date: 05/03/23 Time: 16:02
 Sample: 1991 2020
 Exogenous variables: Individual effects
 Automatic selection of maximum lags
 Automatic lag length selection based on SIC: 2 to 6
 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Method	Statistic	Prob.**	Cross-sections	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)				
Levin, Lin & Chu t*	-3.21541	0.0007	4	99
Null: Unit root (assumes individual unit root process)				
Im, Pesaran and Shin W-stat	-9.00744	0.0000	4	99
ADF - Fisher Chi-square	82.9990	0.0000	4	99
PP - Fisher Chi-square	92.2743	0.0000	4	112

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Sumber : Data diolah dengan eviews 9

Pada tabel di atas dapat dinyatakan bahwa semua variabel yaitu variabel Y, X1, X2, dan X3 stasioner pada tingkat first difference dengan nilai probabilitas berturut-

turut adalah 0.007, 0.000, 0.000, dan 0.0000. Pada mulanya data terlebih dulu diuji stasioneritasnya pada tingkat level, namun karena data tidak stasioner pada tingkat level maka dilakukan uji derajat integrasi. Dari uji tersebut didapatkan bahwa semua variabel stasioner pada tingkat first difference dengan tingkat signifikansi 5% dan 10%.

Uji Kointegrasi

Tabel 2. Uji Kointegrasi

Null Hypothesis: ECT has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.004198	0.0463
Test critical values: 1% level	-3.679322	
5% level	-2.967767	
10% level	-2.622989	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(ECT)

Method: Least Squares

Date: 05/03/23 Time: 16:06

Sample (adjusted): 1992 2020

Included observations: 29 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ECT(-1)	-0.501725	0.167008	-3.004198	0.0057
C	-0.001332	0.020772	-0.064143	0.9493

R-squared	0.250525	Mean dependent var	-	0.001901
Adjusted R-squared	0.222766	S.D. dependent var		0.126880
S.E. of regression	0.111858	Akaike info criterion	-	1.476695
Sum squared resid	0.337832	Schwarz criterion	-	1.382399
Log likelihood	23.41208	Hannan-Quinn criter.	-1.447163	
F-statistic	9.025204	Durbin-Watson stat	2.045030	

Prob(F-statistic) 0.005687

Sumber : Data diolah dengan Eviews 9

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tingkat level residual memiliki nilai probabilitas yaitu 0.0463 di mana lebih kecil dari tingkat $\alpha=5\%$ sehingga dapat dinyatakan telah stasioner. Hal ini mengartikan bahwa telah terjadi kointegrasi di antara semua variabel. Di samping itu, terjadinya kointegrasi ini mengandung makna bahwa dalam model regresi linier berganda yang digunakan mempunyai hubungan jangka panjang.

Error Correction Model (ECM)

Tabel 3. Error Correction Model

Method: Least Squares

Date: 05/03/23 Time: 16:18

Sample (adjusted): 1992 2020

Included observations: 29 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(INFLASI)	0.007023	0.001068	6.575696	0.0000
D(LOGPENGANGGURAN)	0.043998	0.100031	0.439848	0.6640
D(LOGBELANJA)	-0.112136	0.102549	-1.093488	0.2850
ECT(-1)	-0.361675	0.157822	-2.291654	0.0310
C	0.013959	0.024257	0.575493	0.5703
R-squared	0.769518	Mean dependent var	7.54E-05	
Adjusted R-squared	0.731104	S.D. dependent var	0.192385	
S.E. of regression	0.099762	Akaike info criterion	1.616483	
Sum squared resid	0.238857	Schwarz criterion	1.380743	
Log likelihood	28.43901	Hannan-Quinn criter.	1.542652	
F-statistic	20.03238	Durbin-Watson stat	1.875160	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data diolah dengan eviews 9

Pada hasil di atas didapatkan bahwa ECT(-1) signifikan dengan nilai 0.0310 dan berkoefisien negatif yaitu -0,3616, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka pendek yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Dari hasil estimasi ECM di atas didapatkan bahwa hanya variabel inflasi dengan nilai koefisien 0.007 yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan oleh sebab probabilitasnya yaitu sebesar 0.0000 di bawah tingkat α 5%.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek perubahan pada pengangguran akan berpengaruh positif terhadap tingkat penduduk miskin. Dari hasil ECM diperoleh nilai R² sebesar 0.7687 atau 76,8% sehingga dalam penelitian ini menandakan bahwa secara bersama-sama pengaruh variabel pengangguran, inflasi dan belanja pemerintah terhadap tingkat penduduk miskin sebesar 76,8%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 23,2% pengaruh faktor lain atau variabel lain terhadap tingkat kemiskinan

yang tidak terdapat pada model. Selanjutnya, pada hasil ECM juga didapatkan nilai Probabilitas F hitung yaitu sebesar 0.000 di mana nilai ini lebih kecil dari tingkat α 5% sehingga dapat dinyatakan bahwa ECM ini layak digunakan.

Uji Asumsi Klasik
Multikolinieritas

Tabel 4. Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
 Date: 05/03/23 Time: 16:19
 Sample: 1991 2020
 Included observations: 29

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
D(INFLASI)	1.14E-06	1.457082	1.456887
D(LOGPENGANGGURAN)	0.010006	1.498288	1.422100
D(LOGBELANJA)	0.010516	2.272701	1.793656
ECT(-1)	0.024908	1.122818	1.122725
C	0.000588	1.714472	NA

Nilai VIF pada X1, X2, X3, dan RESID01(-1) berturut-turut adalah 1.456887, 1.422100, 1.793656, dan 1.122725 di mana nilai tersebut tidak ada yang lebih dari angka 10. Sehingga, model ECM dapat dikatakan lolos dari uji multikolinieritas.

Autokorelasi

Tabel 5. Autokorelasi

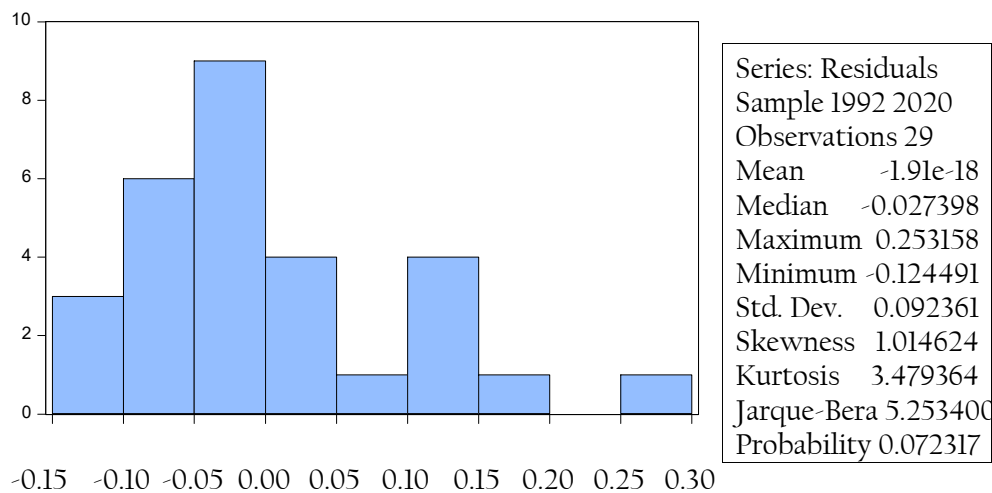
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.873980	Prob. F(2,22)	0.4313
Obs*R-squared	2.134535	Prob. Chi-Square(2)	0.3439

Sumber : Data diolah Eviews 9

Berdasarkan hasil Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test menunjukkan bahwa Nilai Prob. F(2,22) adalah sebesar 0.4313. Nilai yang telah diperoleh tersebut adalah lebih besar dari α 5% sehingga hal ini berarti model ECM telah terbebas dari masalah autokorelasi.

Normalitas



Gambar 1. Normalitas

Sumber : Data diolah Eviews 9

Berdasarkan Histogram - Normality Test menunjukkan bahwa nilai Probabilitas Jarwue-Bera adalah sebesar 0.072317. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa model ECM telah lolos dari ujinormalitas oleh sebab nilai 0.072317 lebih besar dari α 5%.

Linieritas

Tabel 6. Linieritas

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED

Specification: D(LOGMISKIN) D(INFLASI) D(LOGPENGANGGURAN)

D(LOGBELANJA) ECT(-1) C

				Omitted Variables:
Squares of fitted values				
	Value	df	Probability	
t-statistic	1.434441	23	0.1649	F-statistic 2.057622 (1, 23) 0.1649
Likelihood ratio	2.484831	1	0.1149	

Sumber : Data diolah Eviews 9

Hasil Ramsey RESET Test menunjukkan nilai 0.1649 di mana nilai ini lebih dari α 5%. Hal ini menunjukkan bahwa model ECM telah lolos dalam uji linieritas.

Heteroskedastisitas

Tabel 7. Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.553384	Prob. F(14,14)	0.2101
Obs*R-squared	17.64252	Prob. Chi-Square(14)	0.2236
Scaled explained SS	14.97951	Prob. Chi-Square(14)	0.3796

Sumber : Data diolah Eviews 9

Pada Heteroskedasticity Test: White menunjukkan hasil probabilitas dengan nilai 0.2236. Hal ini menunjukkan bahwa model ECM telah lolos dari masalah heteroskedastisitas oleh sebab nilai 0.2236 bernilai lebih dari α 5%.

Regresi Linier Berganda

Berikut merupakan output dari regresi linier berganda yang merupakan alat analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka panjang:

Tabel 8. Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: LOGMISKIN
 Method: Least Squares
 Date: 05/03/23 Time: 16:26
 Sample: 1991 2020
 Included observations:
 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INFLASI	0.009232	0.001828	5.049328	0.0000
LOGPENGANGGURAN	0.236033	0.075383	3.131102	0.0043
LOGBELANJA	-0.062789	0.024457	-2.567289	0.0164
C	11.62748	0.878320	13.23833	0.0000

R-squared	0.676140	Mean dependent var	14.26810
Adjusted R-squared	0.638772	S.D. dependent var	0.218824
S.E. of regression	0.131518	Akaike info criterion	-1.095780
Sum squared resid	0.449722	Schwarz criterion	-0.908953
Log likelihood	20.43670	Hannan-Quinn criter.	-1.036012

F-statistic	18.09388	Durbin-Watson stat	1.002536
Prob(F-statistic)	0.000002		

Sumber : Data diolah Eviews 9

Berdasarkan output regresi linier berganda pada variabel independen x1, nilai probabilitas t hitungnya adalah 0.0000 di mana nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha=5\%$ sehingga variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap penduduk miskin. Variabel X2 memiliki nilai probabilitas t hitung sebesar 0.0043 di mana nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha=5\%$ sehingga variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap penduduk miskin. Selanjutnya variabel X3, nilai probabilitas t hitungnya adalah sebesar 0.0164 yang menunjukkan nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha=5\%$ sehingga variabel belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kemiskinan. Pada koefisien variabel belanja bertanda negatif yang nilainya adalah -0.062789 di mana tanda negatif ini mengartikan bahwa variabel belanja pemerintah berpengaruh negatif terhadap penduduk miskin. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa ketika belanja pemerintah naik maka penduduk miskin akan turun.

Kedua, uji F, merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah model layak digunakan atau tidak. Suatu model dapat diartikan layak ketika nilai probabilitas F hitungnya lebih kecil dari $\alpha=5\%$. Berdasarkan output regresi linier berganda, model tersebut memiliki Probabilitas F hitung sebesar 0.000002 di mana nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha=5\%$ sehingga model ini telah layak digunakan.

Ketiga, uji R^2 , merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi pengaruh variabel bebas terikat. Berdasarkan output regresi linier berganda didapatkan nilai sebesar 0.676140. Dari nilai tersebut mengartikan bahwa secara bersama-sama variabel independen yaitu variabel inflasi, pengangguran dan belanja pemerintah berpengaruh sebesar 67.6% terhadap penduduk miskin. Kemudian sisanya adalah variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Hasil uji asumsi klasik pada regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

Multikolineritas

Tabel 9. Multikolineritas

Variance Inflation Factors

Date: 05/03/23 Time: 16:27

Sample: 1991 2020

Included observations:

30

Variable	Coefficient		
	Uncentered Variance	Centered VIF	Centered VIF
INFLASI	3.34E-06	1.768343	1.203459
LOGPENGANGGURAN	0.005683	1623.188	1.421040
LOGBELANJA	0.000598	61.83047	1.648153
C	0.771445	1337.999	NA

Sumber : Data diolah Eviews 9

Nilai VIF variabel X1, X2, dan X3 berturut-turut adalah 1.203459, 1.421040 dan 1.648153 di mana nilai tersebut tidak ada yang melebihi angka 10. Sehingga, regresi linier berganda telah lolos dalam uji multikolinieritas.

Autokolerasi

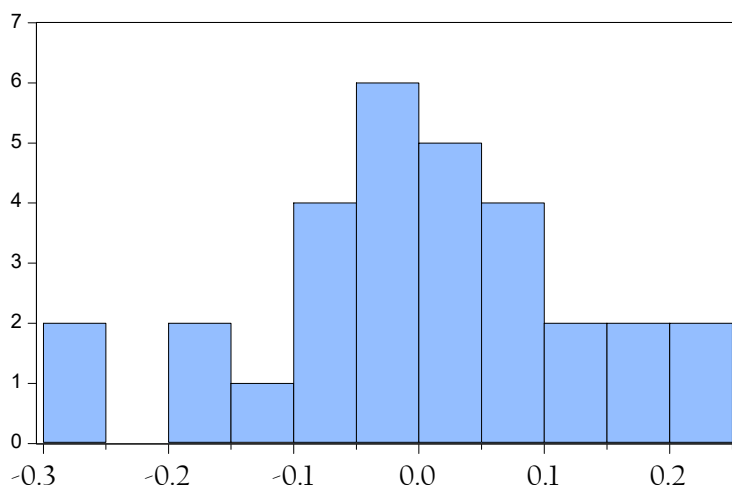
Tabel 10. Autokolerasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	4.363244	Prob. F(2,24)	0.0242
Obs*R-squared	7.999472	Prob. Chi-Square(2)	0.0183

Sumber : Data diolah Eviews 9

Normalitas



Series: Residuals
Sample 1991 2020
Observations 30
Mean -8.88e-16
Median -0.008382
Maximum 0.241503
Minimum -0.266128
Std. Dev. 0.124530
Skewness -0.137986
Kurtosis 2.871052
Jarque-Bera 0.115985
Probability 0.943657

Gambar 2. Normalitas

Sumber : Data diolah Eviews 9

Berdasarkan Histogram – Normality Test yang dapat dilihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Probabilitas Jarque-Bera adalah sebesar 0.94367. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa regresi linier berganda telah lolos dari uji normalitas oleh sebab memiliki nilai 0.94367 yang lebih besar dari 5%

Linearitas

Tabel II. Linearitas

Ramsey RESET Test				
Equation: UNTITLED				
Specification: LOGMISKIN INFLASI LOGPENGANGGURAN				LOGBELANJA C
				Omitted
				Variables: Squares
<hr/>				
of fitted values				
		Value	df	Probability
t-statistic	0.593296	25	0.5583	F-statistic 0.352000 (1, 25) 0.5583
Likelihood ratio		0.419454	1	0.5172

Sumber : Data diolah Eviews 9

Linieritas Hasil Ramsey RESET Test menunjukkan nilai 0.5583 di mana nilai ini adalah lebih dari $\alpha=5\%$. Sehingga, nilai tersebut menunjukkan bahwa regresi linier berganda telah lolos dalam uji linieritas.

Heteroskedastisitas

Tabel 12. Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic		0.772885	Prob. F(9,11)	0.6449
Obs*R-squared		8.135195	Prob. Chi-Square(9)	0.5206
Scaled explained SS		4.888337	Prob. Chi-Square(9)	0.8439

Sumber : Diolah Eviews 9

Pada Heteroskedasticity Test: White menunjukkan hasil probabilitas dengan nilai 0.5206. Hal ini menunjukkan bahwa regresi linier berganda telah lolos dari masalah heteroskedastisitas oleh sebab nilai 0.5206 bernilai lebih besar dari $\alpha=5\%$.

Pembahasan

1. Pengaruh inflasi terhadap penduduk miskin
 Variabel inflasi dalam analisis regresi linier berganda dan analisis Error Correction Model (ECM) memberikan hasil yang berbeda. Pada analisis regresi linier berganda atau analisis jangka panjang, inflasi terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. Besar pengaruh inflasi terhadap kemiskinan dalam jangka panjang yaitu 0.009232. Sedangkan, dalam jangka pendek, Besar pengaruh inflasi terhadap kemiskinan yaitu 0.007023. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ada kenaikan inflasi maka kemiskinan akan naik. Hal ini juga dapat diperkuat dengan penelitian Manik (2013) dan Septajaya (2014) yaitu inflasi yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat berpendapatan

tetap akan tergerus daya belinya, sehingga bagi masyarakat miskin akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

2. Pengaruh pengangguran terhadap penduduk miskin
Dalam jangka panjang, variabel pengangguran terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. Di sisi lain, dalam jangka pendek pun terbukti bahwa perubahan pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. Besar pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan dalam jangka panjang adalah 0.236033. Sedangkan dalam jangka pendek, besar pengaruh perubahan pengangguran terhadap kemiskinan adalah 0.043998. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika ada kenaikan pengangguran maka kemiskinan akan naik. Hasil ini juga diperkuat oleh penelitian astrini (2013), sumaryono (2013) dan parwata (2016), semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Seseorang yang pengangguran dan tidak berpenghasilan tidak akan jatuh miskin jika di dalam rumah tangga tersebut ada yang memiliki penghasilan yang tinggi. Sehingga secara rata-rata belanja perkapita rumah tangga tersebut tetap berada di atas garis kemiskinan.
3. Pengaruh Belanja pemerintah terhadap kemiskinan
Dalam jangka panjang, variabel belanja pemerintah terbukti berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Di sisi lain, dalam jangka pendek belanja pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Besar pengaruh belanja pemerintah terhadap kemiskinan dalam jangka panjang adalah -0.062789. Sedangkan dalam jangka pendek, besar pengaruh perubahan belanja pemerintah terhadap kemiskinan adalah -0.112136. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika ada kenaikan belanja pemerintah maka kemiskinan akan menurun.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Tingkat inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.
2. Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertambahan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.
3. Belanja pemerintah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertambahan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.
4. Secara bersama-sama atau simultan maka tingkat inflasi, pengangguran dan belanja pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara dimana hasil pengujian menunjukkan pengaruh ketiga variabel ini di atas 50%.

Saran

Untuk peneliti yang melakukan penelitian sejenis, penulis menyarankan agar menambah variabel lain yang mempengaruhi kemiskinan dan menggunakan metode penelitian lain dalam menganalisis data agar menjadi variasi dalam penelitian.

Daftar Pustaka

Amalia, Rahmah, dkk. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat" *Jurnal Analisis*, Vol. 4 No. 2 (2015): 183 – 189.

- Fahreza Widyananda, Rakha. (2020). Faktor Penyebab Kemiskinan Beserta Defenisinya.
- Feibe Ise, Naomi., dkk. "Pengaruh Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Periode 2007-2020" Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 22 No 6 (2022): 97-108.
<https://m.merdeka.com/jatim/5-faktor-penyebab-kemiskinan-beserta-definisinya-wajib-diketahui.html?page=5>.
- Kasim, Rahmat., dkk. "Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Kota Manado" Jurnal EMBA Vol.9 No.1 (2021): 953-963.
- Tahun 2015-2019 Dengan Pendekatan Error Corection Model (ECM)" Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol. Vol. 10 No. 1, (2020): 120-128.
- Widiarsih, Dwi., Romanda, Reza. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia.